

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN
TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2017)

Skripsi



Nama : Vivi Sri Devi
NIM : 222014494

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN 2019

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN
TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2017)**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Vivi Sri Devi
NIM : 222014494**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN 2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

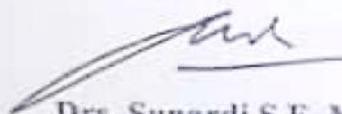
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2017)

Nama : Vivi Sri Devi
NIM : 222014494
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

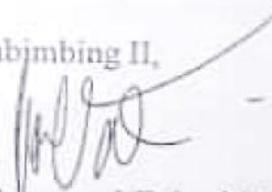
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2019

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021

Pembimbing II,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0029097804/1197277

Mengetahui,
Dekan

Program Studi Akuntansi



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Sri Devi
NIM : 222014494
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan


Vivi Sri Devi

ABSTRAK

Vivi Sri Devi/222014494/2019/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2017)/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai datanya. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer positif dan signifikan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. sedangkan pendapatan transfer negative dan tidak signifikan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : PAD, Pendapatan Transfer, dan Kinerja Keuangan

Abstract

Vivi Sri Devi / 222014494/2019 /The Influence of Regional Income and Transfer Revenue on Regional Government Financial Performance (Case Study in Kabupaten/Kota in South Sumatera Province 2015-2017)/ Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this study was whether or not the Regional Income and Transfer Revenue gave an influence on Regional Government Financial Performance. The objective of this study was to find out whether Regional Income and Transfer Revenue gave an influence on Regional Government Financial Performance. This study was associative research with quantitative approach by using secondary data. The technique for analyzing the data used in this study was helped by Statistical Product and Service Solution (SPSS). The result of this study found that Regional Income and Transfer Revenue gave a positive and significant influence on regional government financial performance. Meanwhile, transfer revenue gave a negative and not significant influence on regional government financial performance.

Keywords: Regional Income, Transfer Income, and Financial Performance

PENGESAHAN

NO. 274 /Abstract/LB/UMP/ II / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang





PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbilamin, Puji dan sukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2017). Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya.

Tempat penelitian ini di Jl. Merdeka no. 8 Kelurahan Talang Semut. Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Fikri Ali dan Ibu Hoiriah, dan seluruh keluarga yang telah mendo'akan, membantu dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sunardi, S.E., M.Si dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.si yang telah membimbing dan memberikan masukan serta pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan, M.M. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Fadhil Yamaly, S.E.,M.Si sebagai pembimbing Akademik
5. Bapak Sunardi, S.E.,M.Si dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf di kantor BPKAD dan perangkat kantor, yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang sudah diberikan baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, maret 2019

Penulis,

Vivi Sri Devi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Bagi Penulis	9
2. Bagi Pemerintah Daerah	10
3. Bagi Almamater	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	11
A. Landasan Teori	11
1. Kinerja Keuangan	11
a. Pengertian Kinerja Keuangan	11

b. Kinerja Keuangan Daerah.....	11
c. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik.....	12
d. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	13
e. Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja ...	13
f. Indikator Kinerja Keuangan.....	14
2. Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Pendapatan Transfer	17
a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan.....	18
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	19
c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19
d. Transfer Bantuan Keuangan.....	20
B. Penelitian Sebelumnya	20
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel	32
D. Populasi dan Sampel	33
1. Populasi	33
2. Sampel	34
E. Data yang diperlukan	35
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	37
1. Analisis Data	37
2. Teknik Analisis	38
a. Statistik deskriptif.....	39
b. Uji Asumsi Klasik	39
1) Uji Normalitas.....	39
2) Uji Autokorelas	40
3) Uji Heteroskedastisitas	41
c. Uji Regresi Berganda.....	41
d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
e. Uji Hipotesis	42
1) Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)	42
2) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).....	45
2. Visi dan Misi	46
3. Analisis Deskriptif Statistik	46
4. Uji Asumsi Klasik	48
a. Uji Normalitas.....	48
b. Uji Autokorelasi.....	49
c. Uji Heteroskedastisitas	50
5. Regresi Linier Berganda	51
6. Koefisien Determinasi (R^2)	53
7. Uji Hipotesis	53
a. Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)	53
b. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah wilayah Republik Indonesia menjadi pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada peraturan pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan keputusan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintah sehingga tercipta tata kelolah pemerintah yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005).

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dikemukakan atas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggungjawab.
2. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD
3. Daerah dalam bentuk dana cadangan
4. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain
5. Pokok-pokok pengelo keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kerja. Anggaran dengan pendekatan kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000)

Otonomi yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonom daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun kenyataan di pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan.

Dengan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintah dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimilikinya. Sumber pendapatan asli daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah.

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya (Halim, 2012). Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dimana dana tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), berkesimpulan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Joice Machmud dan Lukfiah Irwan (2018), menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD (X_1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Variabel DAU (X_2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Variabel DAK (X_3) memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dan secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen dalam hal ini PAD, DAU dan DAK secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2012-2016 dengan nilai signifikansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Masayu dan Catur Martian (2017), menunjukkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Stanly (2016), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2016), menunjukkan bahwa hasil penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, PAD, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Leverage* dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ni Putu (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Armaja, dkk (2015), menyimpulkan bahwa kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Endang (2015), menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah secara simultan, retribusi lokal, hasil dari area pengelolaan kekayaan pendapatan asli daerah lainnya (PAD) yang sah untuk lokal untuk kemandirian dipisahkan dan keuangan Negara/Kota dalam kekayaan provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Zuwesty (2015), menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah. (3) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (4) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi secara bersama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diah Indriani (2014), penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara simultan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk rasio kemandirian, sedangkan untuk rasio lainnya tidak signifikan. (2) secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk rasio kemandirian, sedangkan untuk rasio yang lainnya tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cherrya (2012), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang Sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel I.1
Persentase PAD dan Pendapatan Transfer
Serta Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2015-2017

Daerah	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kinerja Keuangan
Kab. Lahat	2015	102,49	94,45	51,28
	2016	100,93	91,41	2,43
	2017	13,79	27,90	86,21
Kab. Musi Banyuasin	2015	107,56	74,88	5,12
	2016	86,77	93,17	7,03
	2017	48,19	127,50	51,81
Kab. Musi Rawas	2015	101,29	81,35	18,43
	2016	85,68	92,24	12,80
	2017	6,33	85,02	93,66
Kab. Muara Enim	2015	128,50	99,70	12,51
	2016	91,33	93,49	15,33
	2017	80,87	97,68	41,70
Kab. Ogan Komering Ilir	2015	75,71	80,04	24,29
	2016	93,94	101,43	1,11
	2017	48,74	103,77	58,49
Kab. Ogan Komering Ulu	2015	124,46	84,37	24,46
	2016	106,68	97,18	20,43
	2017	57,22	115,92	42,77
Kota Palembang	2015	100,37	99,65	0,36
	2016	92,96	87,63	7,39
	2017	99,31	94,04	52,63
Kota Prabumulih	2015	112,57	40,94	12,57
	2016	88,91	88,38	19,40
	2017	92,25	94,94	50,14
Kota pagaralam	2015	104,51	90,06	31,37
	2016	100,21	92,70	4,31
	2017	98,87	90,81	47,59
Kota Lubuk linggau	2015	88,03	93,48	32,96
	2016	65,88	93,91	13,59
	2017	54,02	50,36	45,98
Kab. Banyuasin	2015	92,32	88,58	10,00
	2016	85,96	89,63	8,31
	2017	114,37	98,74	59,88
Kab. Ogan Ilir	2015	87,33	97,41	14,51
	2016	29,65	96,18	123,72
	2017	30,57	93,00	76,86

Tabel Lanjutan I.2

Kab Oku Timur	2015	102,98	90,86	55,84
	2016	106,68	95,19	7,89
	2017	105,50	94,01	17,49
Kab. Oku Selatan	2015	107,00	87,66	13,46
	2016	83,59	91,03	6,54
	2017	97,52	95,77	54,43
Kab. Empat Lawang	2015	121,34	90,74	16,96
	2016	66,08	90,49	17,59
	2017	69,07	107,46	30,92
Kab. Penukal Abab Lematang ilir	2015	83,58	76,47	147,38
	2016	74,71	91,01	19,40
	2017	64,11	135,55	75,21
Kab. Musi Rawas Utara	2015	90,66	72,06	87,31
	2016	109,83	95,17	10,29
	2017	90,99	117,33	47,54

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.Id*

Tabel di atas menyatakan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten ogan komering ilir mengalami kenaikan persentase pada tahun 2016 sebesar 18,23 % , sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase sebesar 45,2 % berbanding terbalik dengan pendapatan transfer yang selalu meningkat di setiap tahunnya. besarnya pendapatan transfer yang diterima kabupaten ogan komering ilir dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial?
3. Apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah cakrawala keilmuan tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer terhadap kinerja keuangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer terhadap kinerja keuangan.

3. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Kurniawan. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung: Alfabeta.
- Armaja, dkk (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 2, September. <https://www.google.com/search?q=jurnal+ilmiah+armaja+ridwan&ie=utf-8&oe=utf-8>.
- Antari Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN : 2302-8912 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Ayu Putri Puspita (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* Vol.3 No1, Maret. <https://www.ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/12007/825/>
- Budianto dan Stanly W. Alexander. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.4, Desember. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14511>
- Diah Indriani (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. *Portofolio* Volume 11 No.1, Mei. http://repository.fe.unjani.ac.id/pdf/06_Usman_Sastradipridja.pdf
- Halachmi. (2005). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 2, September. <https://www.google.com/search?q=jurnal+ilmiah+armaja+ridwan&ie=utf-8&oe=utf-8>
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* 23. Semarang: Undip
- Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science* Vol.2 No.1 EISSN 2548-3501.
<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas>

Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung; Andi

Menurut Pemendagri No. 32 Tahun 2008. *Pelaksanaan Desentralisasi*.

Mulatsih Endang Sri (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012. *Portofolio Volume 11 No.1, Mei*.http://news.palcomtech.com/wp-content/uploads/downloads/2016/09/ENDANG_JE050315.pdf

Peraturan Pemerintah UU No. 71 Tahun 2010. *Tentang Laporan Keuangan*.

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah UU No. 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.

Putri Zuwesty Eka .(2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015*.<https://anzdoc.com/zuwesty-eka-putri-uin-syarif-hidayatullah-jakarta.html>

Sari Indah Puspa (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon Vol.3 No.1 (Februari)*.
<https://media.neliti.com/media/publications/115984-ID-pengaruh-ukuran-pemerintah-daerah-pad-le.pdf>

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2017). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung; Alfabeta.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 9. *Tentang Dana Perimbangan*.

Utang Rosidin. (2015). Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung : Cv Pustaka Setia.

Wati Masayu Rahma dan Catur Martian Fajar (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi Vol.1 (1)*.<http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>

Wenny Cherry Dhia (2012). Analisis Pengaruh Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2 No.1, September*. <http://eprints.mdp.ac.id/676/1/4.%20CHERRYA%20.pdf>